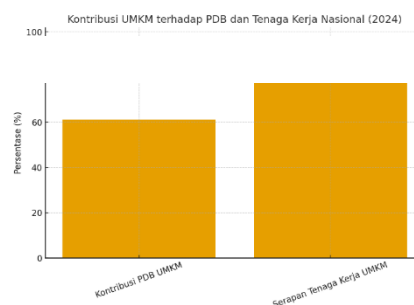


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

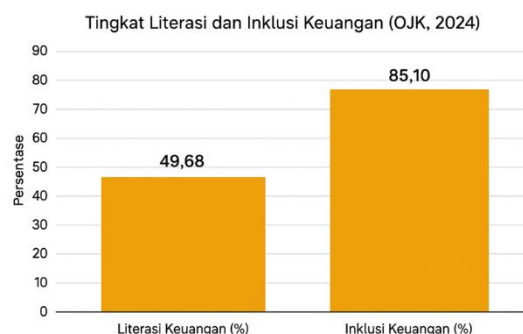
Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Literasi keuangan yang baik membantu masyarakat mengelola keuangan secara efektif, sementara inklusi keuangan memastikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal (Ozili, n.d.-b). UMKM memiliki peran strategis dalam membangun struktur ekonomi nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,1%, sementara serapan tenaga kerja mencapai 119,6 juta orang atau 97% tenaga kerja nasional. Kontribusi besar ini menegaskan bahwa keberhasilan sektor UMKM sangat berpengaruh terhadap ketahanan perekonomian Indonesia, terutama dalam menghadapi kondisi global yang tidak stabil. Namun demikian, penguatan UMKM masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan serta rendahnya pemanfaatan layanan keuangan formal (Salsabillah et al., n.d.).



Gambar 1.1 Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Tenaga Kerja Nasional 2024

Pengertian UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun kelompok dengan batasan tertentu pada aset dan omzet. UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta memberikan kontribusi terhadap pemerataan ekonomi masyarakat. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai wilayah termasuk Kabupaten Banyumas yang memiliki jumlah UMKM terbesar di kawasan Barlingmascakeb (Islam, 2022).

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nasional masih berada pada angka 49,68%, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 85,10%. Gap yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sudah tinggi, tetapi pemahaman dalam menggunakan produk tersebut masih terbatas. Kondisi ini memunculkan risiko terhadap pengelolaan keuangan yang tidak optimal, terutama bagi pelaku UMKM yang bergantung pada ketepatan pencatatan, penganggaran, pengelolaan modal kerja, dan pengambilan keputusan keuangan untuk menjaga stabilitas usahanya.



Gambar 1.2 Tingkat Literasi dan Inklusi Kuangan 2024

Hasil penelitian mendukung pentingnya literasi keuangan bahwa UMKM dengan literasi keuangan yang baik lebih mampu mengatur arus kas dan melakukan pencatatan keuangan, sehingga meningkatkan kinerja usaha (Djoewita et al., n.d.). Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan pengambilan keputusan investasi, pengendalian biaya, dan manajemen risiko. Dengan demikian, literasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan dasar, tetapi juga alat strategis bagi perkembangan usaha (Yakob et al., 2021).

Selain literasi keuangan, inklusi keuangan juga memiliki peran penting dalam memperkuat UMKM. Akses terhadap lembaga keuangan formal memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan, menggunakan layanan pembayaran digital, mengelola transaksi secara transparan, dan meningkatkan efisiensi usaha (Markonah et al., 2024). Namun, Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa 45% pelaku UMKM masih mengandalkan pembiayaan informal, yang menunjukkan adanya hambatan dalam pemanfaatan fasilitas perbankan dan fintech resmi. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan dokumen legalitas usaha, kurangnya jaminan, atau minimnya pemahaman mengenai produk keuangan.

Penelitian lain juga menegaskan pengaruh positif inklusi keuangan terhadap keberlanjutan usaha. (Iskandar Rahmansyah et al., 2024) menunjukkan bahwa inklusi keuangan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mempertahankan operasional, memperkuat modal kerja, dan melakukan ekspansi. Akses keuangan memberi kemampuan adaptif bagi UMKM dalam menghadapi

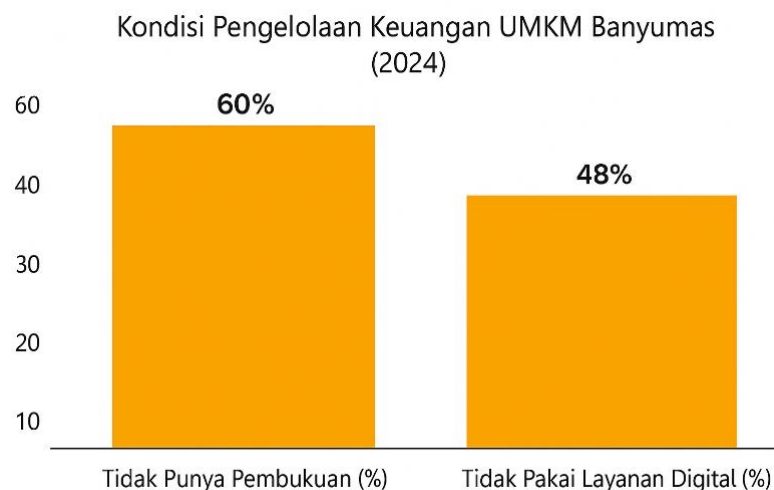
perubahan pasar, khususnya pada era digital yang menuntut pemanfaatan layanan keuangan elektronik.

Pada level daerah, UMKM di Kabupaten Banyumas memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Banyumas (2024), jumlah UMKM mencapai 89.553 unit, terdiri dari 89.477 usaha mikro, 21 usaha kecil, dan 55 usaha menengah. Wilayah dengan jumlah UMKM tertinggi antara lain Ajibarang (5.521 unit), Karanglewas (5.231 unit), Cilongok (6.149 unit), Gumelar (4.066 unit), dan Kemranjen (4.259 unit). Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Banyumas.

Pada saat ini kebanyakan UMKM masih belum menyelenggarakan pembukuan akuntansi dan pelaporannya dengan baik. Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menyediakan laporan keuangan yang informatif merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh UMKM apabila ingin mengembangkan usahanya, karena dengan adanya pencatatan dan pembukuan akan memudahkan UMKM untuk mengetahui perjalanan bisnisnya, kendala-kendala apa saja yang dialami, dan informasi-informasi yang dibutuhkan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi

keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada laba semata (Pamikatsih, 2022).

Meskipun demikian, survei Dinas Koperasi dan UKM Banyumas (2024) menunjukkan bahwa 60% UMKM belum memiliki pembukuan usaha, dan sekitar 48% belum memanfaatkan layanan keuangan digital seperti mobile banking, QRIS, atau e-wallet. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan menjadi hambatan utama yang mengurangi profesionalisme dan daya saing UMKM, serta menyebabkan kesulitan memperoleh pembiayaan formal atau meningkatkan profitabilitas usaha.



Gambar 1.3 Kondisi Pengelolaan Keuangan UMKM Banyumas 2024

Rendahnya pemanfaatan layanan digital tersebut menunjukkan bahwa peran *financial technology* (fintech) sebagai alat pendukung pengelolaan keuangan UMKM masih belum optimal. Padahal, fintech dapat membantu UMKM dalam pencatatan keuangan otomatis, transaksi non-tunai, akses modal usaha melalui *P2P lending*, serta pengelolaan arus kas secara lebih efisien. Oleh karena itu,

fintech menjadi variabel mediasi yang penting untuk melihat apakah penggunaan teknologi keuangan dapat memperkuat pengaruh literasi dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Banyumas.

Banyak pelaku UMKM di Banyumas belum mampu mengelola usaha secara optimal akibat keterbatasan pengetahuan, modal, teknologi, dan terutama manajemen keuangan. Menurut (Abor & Quartey, 2010), keterlambatan perkembangan UMKM sering disebabkan oleh masalah klasik seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kesulitan permodalan, keterbatasan pemasaran, serta lemahnya pengelolaan usaha. Kondisi serupa terjadi pada UMKM Banyumas yang sebagian besar masih dikelola secara tradisional dan belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang baik.

Kinerja keuangan merupakan indikator keberhasilan usaha yang ditunjukkan melalui stabilitas arus kas, pertumbuhan penjualan, peningkatan modal, dan profitabilitas yang sehat. Namun banyak UMKM Banyumas belum mampu mencapai hal tersebut akibat kurangnya pemahaman tentang pengaturan keuangan, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pengelolaan utang, serta pemanfaatan layanan keuangan formal. Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM adalah literasi keuangan (Permoni et al., 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam mengambil keputusan finansial untuk kesejahteraan. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan UMKM kesulitan mengelola modal, arus kas, dan strategi bisnis.

Selain itu, inklusi keuangan juga penting karena memudahkan akses terhadap layanan formal seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran digital. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK menunjukkan bahwa meskipun inklusi meningkat, literasi masih tertinggal sehingga banyak pelaku UMKM menggunakan layanan keuangan tanpa memahami cara memanfaatkannya secara optimal. Fenomena tersebut juga terjadi pada UMKM Banyumas yang masih menghadapi kendala pemanfaatan layanan keuangan, baik karena minimnya pemahaman administrasi, ketergantungan pada pembiayaan informal, maupun rendahnya pemanfaatan QRIS, e-wallet, atau perbankan digital. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk menunjang kinerja keuangan UMKM.

Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui *Theory of Financial Literacy* dan *Theory of Financial Inclusion*. Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami dan mengelola konsep keuangan dasar untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan yang tepat (Mitchell et al., 2013). Sementara itu, inklusi keuangan menekankan pentingnya akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan keuangan formal agar pelaku usaha dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara optimal (Ozili, n.d.-a, 2025). Rendahnya tingkat literasi keuangan dan keterbatasan inklusi keuangan menyebabkan UMKM kurang optimal dalam mengelola keuangan usaha, sehingga berdampak pada kinerja keuangan.

Perkembangan *financial technology* (fintech) menjadi solusi potensial dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan (Davis, 1989). Selain itu, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa sikap dan persepsi kontrol perilaku memengaruhi niat individu dalam menggunakan suatu teknologi (Ajzen, 1991). Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan dan inklusi keuangan yang baik cenderung memiliki persepsi positif serta keyakinan dalam menggunakan fintech, sehingga pemanfaatannya mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan berdampak positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Banyumas.

Penelitian sebelumnya mengenai literasi keuangan, inklusi keuangan, dan kinerja UMKM menunjukkan hasil bervariasi. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif literasi keuangan terhadap kinerja UMKM (Nuraisyah et al., 2025), sementara penelitian lain menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai pemacu pertumbuhan usaha kecil (Nadziroh et al., 2023). Namun, sebagian besar penelitian dilakukan pada wilayah umum dan belum mengkaji kondisi spesifik Kabupaten Banyumas, terutama terkait infrastruktur keuangan dan karakteristik sosial ekonomi pedesaan.

Selain itu, kesenjangan penelitian juga terlihat dari masih sedikitnya penelitian yang memasukkan *financial technology* (fintech) sebagai variabel mediasi dalam hubungan literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM, khususnya di Kabupaten Banyumas. Padahal,

tingkat digitalisasi keuangan yang terus meningkat menuntut UMKM untuk memanfaatkan fintech secara lebih maksimal sebagai sarana transaksi, pencatatan keuangan, dan akses pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk menguji apakah fintech dapat memperkuat hubungan tersebut.

Kebutuhan penelitian ini semakin kuat seiring meningkatnya digitalisasi sistem keuangan. Pelaku UMKM perlu memahami produk keuangan, memanfaatkan teknologi digital, dan mengakses pembiayaan secara tepat agar dapat meningkatkan nilai usaha. Oleh karena itu, penelitian mengenai Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Banyumas diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan daerah dan program pelatihan UMKM yang lebih terarah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap *financial technology* pada UMKM di Kabupaten Banyumas.
2. Apakah terdapat pengaruh inklusi keuangan terhadap *financial technology* pada UMKM di Kabupaten Banyumas.
3. Apakah terdapat pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Banyumas
4. Apakah terdapat pengaruh langsung literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Banyumas
5. Apakah terdapat pengaruh langsung inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Banyumas

6. Apakah *financial technology* mampu memediasi hubungan antara literasi keuangan dan kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Banyumas
7. Apakah *financial technology* mampu memediasi hubungan antara inklusi keuangan dan kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Banyumas

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap *financial technology* pada UMKM di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap *financial technology* pada UMKM di Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Banyumas
4. Untuk mengetahui pengaruh langsung literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Banyumas
5. Untuk mengetahui pengaruh langsung inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Banyumas
6. Untuk mengetahui *financial technology* mampu memediasi hubungan antara literasi keuangan dan kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Banyumas
7. Untuk mengetahui *financial technology* mampu memediasi hubungan antara inklusi keuangan dan kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Banyumas.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini membatasi ruang lingkup pada variabel Literasi Keuangan (X1) dan Inklusi Keuangan (X2) sebagai variabel independen, Kinerja Keuangan UMKM sebagai variabel dependen (Y), serta *Financial Technology* sebagai variabel mediasi (M). Penelitian ini difokuskan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar teori bagi studi lanjutan yang membahas bagaimana literasi keuangan, inklusi keuangan, serta pemanfaatan *financial technology* berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana peningkatan pemahaman keuangan, kemudahan akses layanan keuangan, dan penggunaan teknologi keuangan dapat membantu UMKM dalam mengelola usahanya secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur manajemen keuangan khususnya pada konteks UMKM di Kabupaten Banyumas, yang memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu keuangan, penguatan

sektor UMKM, serta pemahaman lebih mendalam terkait peran *financial technology* sebagai variabel mediasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja UMKM melalui penguatan literasi keuangan, inklusi keuangan, serta pemanfaatan *financial technology*. Hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam pengembangan program pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi teknologi keuangan yang mampu mendorong efisiensi, akses ke pembiayaan, serta peningkatan daya saing UMKM di tingkat lokal.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan pengembangan UMKM. Kajian ini juga memperkaya literatur mengenai peran *financial technology* sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya maupun bahan pembelajaran di lingkungan akademik.

c. Bagi UMKM di Kabupaten Banyumas

Penelitian ini memberikan wawasan bagi para pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pemanfaatan *financial technology* untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan usaha. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengambil keputusan finansial yang lebih tepat, memperluas akses layanan keuangan, serta mendorong peningkatan kinerja usaha secara berkelanjutan.